

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan sebuah proses kegiatan yang disengaja oleh siswa yang akan menimbulkan suatu hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sebagai sebuah proses maka pendidikan harus di evaluasi hasilnya untuk melihat apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan apakah proses yang dilakukan telah efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pendidikan merupakan sebuah program yang terdiri dari beberapa komponen yang bekerja dalam sebuah sistem. Komponen-komponen bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional. “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Jika dikaitkan dengan pembangunan nasional, pendidikan merupakan salah satu bagian yang penting, karena keterkaitan antara pendidikan dengan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan. Di antara sekian banyak rencana pembangunan

nasional, pendidikan merupakan salah satu rencana penting dan strategis yang menuntut perhatian sungguh-sungguh dari semua pihak. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia (*human capital*) yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa.

Menghadapi persaingan global yang semakin kuat, pemerintah dan masyarakat harus menyiapkan sumberdaya manusianya mengerahkan segenap potensinya melalui suatu sistem dan strategi pendidikan yang mampu merespon berbagai tantangan tersebut. Penyiapan sumberdaya manusia yang berkualitas ini tentulah tidak mudah. Oleh karena itu perlu ada kebijakan dan komitmen dari pemerintah juga bagi satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis menggunakan strategi khusus mulai dari rekrutmen peserta didik, proses pembelajaran, kurikulum tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan fasilitas belajar disiapkan sedemikian rupa agar memenuhi syarat yang ditentukan.

Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki secara utuh dan optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Menurut Nanang Fattah (2009:78) :

“Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapkan kepada masalah antara lain peningkatan kualitas, pemerataan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumberdaya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Masalah perluasan kesempatan merupakan dampak nyata dalam memberikan tempat pada demokratis pendidikan, sebagai pendidikan nasional kita selalu dihadapkan pada masalah kualitas dan kuantitas, terlebih pada masa krisis ekonomi dimana daya dukung ekonomi keluarga semakin melemah yang mengakibatkan banyak usia sekolah tidak dapat melanjutkan sekolah, meningkatnya angka putus sekolah”.

Napitupulu (2011) mengatakan bahwa Indeks pembangunan pendidikan untuk semua atau *education for all* di Indonesia menurun. Jika pada 2010 lalu Indonesia berada di peringkat 65, tahun 2011 merosot ke peringkat 69. Saat ini Indonesia masih tertinggal dari Brunei Darussalam yang berada di peringkat ke-34. Brunei Darussalam masuk kelompok pencapaian tinggi bersama Jepang, yang mencapai posisi nomor satu dunia. Adapun Malaysia berada di peringkat ke-65 atau masih dalam kategori kelompok pencapaian medium seperti halnya Indonesia.

Belum tercapainya tujuan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari masih rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dimana hal tersebut menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh dunia pendidikan, melihat permasalahan tersebut pemerintah dan lembaga pendidikan berusaha untuk melakukan perbaikan melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan, dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik lainnya.

Kondisi pendidikan di Kab. Purwakarta relatif masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan kualifikasi pendidikan guru belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal (guru masih/ sedang melanjutkan studi sarjana), kondisi fisik bangunan yang rusak, angka partisipasi murni SMA 85%. Kondisi umum pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Kondisi Umum Pendidikan SMA Kabupaten Purwakarta

NO	ASPEK	TAHUN 2012
1	Banyaknya Murid SMA Negeri/Swasta	88,993
2	Jumlah SMA	
	Negeri	14
	Swasta	8
3	Angka Partisipasi Murni SMA	85
4	Angka Partisipasi Kasar SMA	90
	Jumlah Guru SMA	
	a. PNS	383
5	b. Guru Bantu	0
	c. pegawai PNS	57
	d. PTT	118
	e. Honorer Sekolah/BP3	137
6	Jumlah Guru PNS Ber Sertifikasi	325
7	Jumlah Guru Non PNS/GTT Ber Sertifikasi	38
8	Jumlah Guru PNS yang belum Ber Sertifikasi	58
9	Jumlah Guru Non PNS/GTT yang belum Bersertifikasi	79
	KUALIFIKASI PENDIDIKAN GURU SMA	
	a. SMA	7
10	b. Diploma	27
	c. S.1	472
	d.S.2	45
	Kondisi Fisik Bangunan SMA	
11	Baik	170
	Rusak Ringan	13
	Rusak Berat	5

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Purwakarta

Menurut Sujana (2011:62) “Keberhasilan suatu proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa”. Dari pendapat tersebut indikator keberhasilan pendidikan dalam penelitian ini dapat dilihat diantaranya dari hasil NEM ujian nasional (UN). Ujian Nasional biasa disingkat UN / UNAS adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh pusat penilaian pendidikan, Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kondisi kualitas prestasi belajar siswa SMA Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari rata-rata NEM Ujian Nasional (UN) yang diperoleh pada tahun ajaran 2011/2012 mengalami penurunan walaupun pada tahun ajaran 2010/2011 mengalami kenaikan. Kondisi umum kualitas prestasi belajar siswa SMA Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari Tabel rata-rata NEM UN SMA Negeri se-Kab. Purwakarta sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Rata-rata NEM UN SMA Negeri
Se- Kab. Purwakarta**

Jurusan	Tahun Ajaran		
	2009/2010	2010/2011	2011/2012
IPA	46,96	47,05	46,63
IPS	45,14	45,18	44,13

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Purwakarta

Berhasil tidaknya seorang siswa meraih prestasi belajarnya tergantung dari banyak hal atau tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. B.Bloom dalam Budiningsih (2005: 74) dengan teori taksonomi mengatakan bahwa “ada dua faktor utama yang dominan terhadap hasil belajar yaitu karakteristik siswa yang meliputi (kemampuan, minat, hasil belajar sebelumnya, motivasi) dan karakter pengajaran yang meliputi (guru dan fasilitas belajar)”.

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil, yaitu : Pertama, strategi pembangunan pendidikan selama ini bersifat *input oriented*, strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah terpenuhi seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga pendidikan dan didukung oleh biaya yang memadai, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan menghasilkan *output* (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini bersifat *makro oriented* yaitu pengelolaan pendidikan diatur oleh jajaran birokrasi tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat daerah. Hal ini menyebabkan tidak adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tergantung pada pemerintah pusat. Akibatnya ada keterbatasan dana, maka terjadilah ketidakmerataan pembiayaan disegala bidang termasuk pendidikan. Hal tersebut berdampak pada rendahnya mutu pendidikan di daerah dibandingkan dengan di perkotaan. (Umaedi, 2010:2)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah pusat maupun daerah terus meningkatkan anggaran untuk pendidikan. Sejalan dengan ini Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) menyatakan : Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk memperbaiki mutu proses pencerdasan bangsa yang berkelanjutan, pelaksanaan pendidikan jalur sekolah melalui pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta pendidikan jalur luar sekolah, maka perlu disinergikan aktivitasnya. Lembaga pendidikan harus menempatkan dirinya sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia. Karena itu, kualitas pendidikan nasional perlu terus ditingkatkan yang dilaksanakan sebagai bagian integral dari program pembangunan nasional.

Berkenaan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Melalui SNP ini pemerintah menetapkan kriteria minimal yang harus dipenuhi pada sistem pendidikan di Indonesia. Kriteria minimal ini terdiri dari delapan standar pendidikan yang harus dipenuhi dalam proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kedelapan standar tersebut yaitu : 1. Standar Kompetensi Lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,

pengetahuan dan ketrampilan; 2. Standar Isi, yaitu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu; 3. Standar Proses, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan; 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan; 5. Standar sarana dan prasana, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; 6. Standar pengelolaan, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan Kabupaten atau Kota, Provinsi atau Nasional agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan; 7. Standar pembiayaan, yaitu standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; 8. Standar penilaian pendidikan, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.

Selain dengan kebijakan penetapan kriteria minimal standar pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pada tanggal 25 September 2009 melalui Kementerian Pendidikan Nasional pemerintah menerbitkan Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam peraturan ini, mutu pendidikan didefinisikan sebagai tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Dalam sistem penjaminan mutu pendidikan terdapat tujuan akhir dan tujuan antara. Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan Standar Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Sedangkan salah satu tujuan antara penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal dan atau informal.

Kualitas pendidikan bersifat multi dimensi yang meliputi aspek input, proses, dan output. Oleh karena itu indikator kualitas pendidikan dikembangkan dari aspek-aspek tersebut. Pembiayaan pendidikan merupakan faktor yang tidak dapat dihindarkan keberadaannya dalam menyediakan komponen-komponen input pendidikan. Karena pendidikan merupakan suatu proses, maka input yang bermutu akan membuat proses belajar mengajar yang bermutu, dan pada gilirannya akan membuat prestasi belajar menjadi lebih baik. (Nanang Fatah, 2009:136).

Pendidikan yang berkualitas akan dapat dicapai apabila tersedia biaya yang memadai. Hal tersebut dipertegas oleh R.L. Johns, E.L. Morphet, K. Alexander, 1983 dalam Nanang Fatah (2009:108) bahwa biaya dan mutu pendidikan mempunyai

keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan, dan tenaga pendidik yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar mengajar.

Prasojo (2010) mengatakan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan.

Dalam setiap tahun ajaran, sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten / Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta).

Struktur biaya pendidikan terdiri dari : (a) biaya satuan pendidikan, (b) biaya personal, dan (c) biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan (Nanang Fattah, 2012:17). Penelitian ini difokuskan pada biaya penyelenggaraan dan satuan pendidikan yaitu biaya operasi nonpersonalia. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun

sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.

Besarnya biaya operasional nonpersonalia untuk penyelenggaraan pendidikan masing-masing sekolah bervariasi. Hal ini menunjukkan pada setiap sekolah mempunyai target untuk mencapai pendidikan yang berkualitas tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh pelaksana sekolah. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai besarnya biaya yang dikeluarkan oleh setiap siswa, dibawah ini gambaran mengenai besarnya jumlah *unit cost* untuk biaya nonpersonalia :

**Tabel 1.3 Satuan biaya nonpersonalia per siswa SMA Negeri
Kabupaten Purwakarta Tahun 2011**

Sekolah	Jumlah Biaya Operasional Nonpersonalia	Jumlah murid	Satuan biaya per murid per tahun
SMAN 1 Purwakarta	1,108,077,000	1,055	1,050,310
SMAN 2 Purwakarta	1,206,059,500	1,150	1,048,747
SMAN 3 Purwakarta	910,200,000	1,015	896,749
SMAN 1 Bungursari	715,067,600	795	899,456
SMAN 1 Cibatu	660,670,000	685	964,482
SMAN 1 Darangdan	593,413,000	612	969,629
SMAN 1 Jatiluhur	885,789,800	855	1,036,011
SMAN 1 Maniis	148,296,000	193	768,373
SMAN 1 Pasawahan	554,579,900	570	972,947
SMAN 1 Sukasari	74,148,000	98	756,612
SMAN 1 Sukatani	902,104,000	965	934,823
SMAN 1 Tegalwaru	635,560,900	630	1,008,827
SMAN 1 Wanayasa	915,670,400	943	971,018
SMAN 1 Campaka	226,000,000	261	865,900

Sumber : SMA Negeri Kab. Purwakarta

Semua permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, jika ditelaah mendalam akhirnya akan mengarah pada suatu bagian yang mendasar, yaitu penyediaan dana atau anggaran pendidikan yang umumnya diperlukan dalam jumlah nominal yang cukup besar. Besarnya anggaran pendidikan yang dibutuhkan merupakan implikasi dari semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan sebagai akibat kemajuan pembangunan, atau dengan kata lain hubungan biaya pendidikan akan berbanding lurus dengan mutu pendidikan yang diperlukan masyarakat.

Dalam proses pendidikan di sekolah, kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang paling pokok. Berhasil tidaknya tujuan pendidikan sangat bergantung pada pembelajaran yang dilaksanakan. Pada dasarnya pembelajaran merupakan merupakan proses komunikasi yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan

siswa maupun guru dengan sekolah. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan secara efektif, guru menempati posisi yang cukup strategis. Berdasarkan UU RI No 14 tahun 2005, bahwa:

”Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam dunia pendidikan. Ruh pendidikan sesungguhnya terletak dipundak guru. Baik buruknya atau berhasil tidaknya pendidikan hakikatnya ada di tangan guru. Oleh karena itu, sosok guru memiliki peranan yang strategis dalam menghasilkan peserta didik menjadi pandai, cerdas, terampil, bermoral dan berpengetahuan luas.

Seorang guru yang baik adalah mereka yang memenuhi persyaratan kemampuan profesional baik sebagai pendidik maupun sebagai pengajar atau pelatih. Di sinilah letak pentingnya standar mutu profesional guru untuk menjamin proses belajar mengajar dan hasil belajar yang bermutu. Hasil wawancara dengan pengawas di dinas Kabupaten Purwakarta terkait dengan profesionalisme guru, ada beberapa permasalahan yang terjadi pada kondisi guru di Kabupaten Purwakarta, misalnya masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi lulusan, masih terdapat guru yang mengajar tidak sesuai latar belakang pendidikannya, kurang menyadari adanya keterpaduan dalam belajar, bahkan masih ada beberapa guru yang belum memahami secara benar teknik dan metode dalam mengajar.

Eksistensi guru menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari satu kesatuan interaksi pedagogis dalam sistem pengelolaan pengajaran pendidikan (sekolah), hal tersebut sejalan dengan cita-cita yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional. Karena itu, sikap profesionalisme dalam dunia pendidikan (sekolah), tidak sekadar dinilai formalitas tetapi harus fungsional dan menjadi prinsip dasar yang melandaisai aksi operasionalnya. Tuntutan demikian ini wajar karena dalam dunia modern, khususnya dalam rangka persaingan global, memerlukan sumber daya manusia yang bermutu dan selalu melakukan improvisasi diri secara terus menerus. Dalam penelitian ini kinerja guru terbatas pada penilaian supervisi guru dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah, rekan guru, dan pengawas sekolah. Indikator yang dinilai meliputi : pra pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penutup (evaluasi).

Akhirnya karena kualitas merupakan cerminan dari kepentingan, harapan kegunaan, citarasa, serta faktor sikap lainnya yang ada pada setiap saat akan berubah dan meningkat, maka evaluasi terhadap kualitas pendidikan dan hasil dari lembaga pendidikan perlu dilakukan secara periodik, termasuk di dalamnya adalah upaya mengkaji ulang indikator kualitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang seberapa besar faktor biaya pendidikan dan kinerja guru berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Pendidikan merupakan salah satu elemen paling penting dalam membangun SDM yang berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang timbul di SMA yang akan diteliti berkaitan dengan prestasi belajar siswa.

Permasalahan tersebut muncul akibat dana yang diberikan dari pemerintah kurang mencukupi untuk penyelenggaraan proses belajar yang berkualitas sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sehingga, untuk mengatasinya maka siswa dibebankan membayar biaya pendidikan, salah satu cara pemecahannya adalah membayar uang SPP (iuran bulanan). Tetapi, dampak yang dirasakan belum cukup untuk memenuhi standar pendidikan yang berkualitas.

Disisi lain kinerja guru dapat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Keterkaitan antara faktor pembiayaan pendidikan dan kinerja guru dengan prestasi belajar siswa SMA merupakan fokus dalam penelitian ini. Oleh karena itu yang menjadi perumusan masalah yaitu :

1. Seberapa besar biaya operasional nonpersonalia di SMA Negeri Kabupaten Purwakarta ?
2. Seberapa besar kinerja guru ?
3. Seberapa besar prestasi belajar ?
4. Seberapa besar pengaruh biaya operasional nonpersonalia dan kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa baik parsial maupun simultan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar biaya operasional nonpersonalia di SMA Negeri Kabupaten Purwakarta ?
2. Untuk mengetahui seberapa besar kinerja guru?
3. Untuk mengetahui seberapa besar prestasi belajar siswa?
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh biaya operasional nonpersonalia dan kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa baik parsial maupun simultan?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat terutama berkaitan dengan biaya pendidikan dan kinerja guru dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di SMA, adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam ilmu Ekonomi Pembiayaan, khususnya tentang pengaruh faktor biaya langsung (*direct cost*) nonpersonalia terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu, sebagai salah satu bentuk investasi (*human investment*) dalam meningkatkan produktivitas.

3. Dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan mengenai biaya pendidikan secara utuh.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan informasi dalam cara upaya perbaikan kebijakan anggaran yang lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan biaya pendidikan SMA di Kabupaten Purwakarta.
2. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengambil keputusan terhadap peningkatan kualitas pendidikan SMA di Kabupaten Purwakarta.
3. Sebagai bahan masukan sekolah yaitu bagi kepala sekolah dan guru SMA dalam membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan upaya peningkatan kinerja guru yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa.

E. Struktur Penulisan

Struktur penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan : Pada bagian ini dibahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penulisan.
2. BAB II Kajian pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian : Pada bagian ini diuraikan tentang konsep-konsep atau teori-teori mengenai pengertian biaya pendidikan, pengertian dan standar kinerja guru, pengertian dan konsep mengenai kualitas pendidikan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

3. BAB III Metodologi penelitian : Pada bagian ini menyajikan mengenai metode penelitian, termasuk komponen : lokasi dan subjek populasi/sampel serta justifikasi dari pemilihan lokasi serta penggunaan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengolahan data.
4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang analisis hasil dan pembahasan hasil penelitian.
5. BAB V Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan dan saran.

